

EKONOMI POLITIK INISIATIF *ONE BELT ONE ROAD* TIONGKOK
ONE BELT ONE ROAD AS CHINA POLITICAL ECONOMIC INITIATIVE

Mercy Widjaja
Journalist Practitioner Metro TV, Jakarta
mercywidjaja@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini menganalisis motif politik dibalik kebijakan ekonomi suatu negara, seperti halnya Tiongkok yang mengajukan inisiatif One Belt One Road (OBOR) untuk membantu pembangunan infrastruktur dan industri di negara berkembang termasuk Indonesia. Inisiatif OBOR juga menjadi perhatian dalam konteks persaingan dua kekuatan besar dunia, yaitu Amerika Serikat dan Tiongkok. Inisiatif OBOR dapat memperbesar kekuatan politik Tiongkok di kancah global, dan menjadi ancaman yang lebih besar bagi Amerika Serikat. Untuk mengumpulkan data dan argumen mengenai posisi politik dan ekonomi Tiongkok di kancah global, penelitian ini menggunakan metode eksplanatif-kualitatif. Neorealisme, stabilitas hegemoni, regionalisme, dan ekonomi politik adalah teori yang digunakan untuk membentuk kerangka berpikir dan penyelesaian masalah yang ada. Menurut teori neorealisme perilaku suatu negara merupakan manifestasi kepentingan negara tersebut, dan dapat bertentangan dengan kepentingan negara lainnya. Karena kepentingan utama suatu negara adalah kelangsungan hidup negara (*survival of state*) dan warga negaranya, maka satu-satunya cara mengamankan kepentingan nasionalnya adalah dengan menjadi negara yang kuat. Semakin besar kekuatan suatu negara, maka semakin kecil kemungkinan negara tersebut dapat diserang. Hal tersebut dapat menjadi alasan mengapa Tiongkok berusaha melakukan perimbangan kekuatan terhadap negara saingan, yaitu melalui inisiatif OBOR.

Kata kunci: Ekonomi Politik, Kebijakan Luar Negeri, Persaingan Kekuatan, Proyeksi Kekuatan, Hegemoni.

Abstract

This study analyses political motives behind China's economic policy, known as One Belt One Road (OBOR) Initiative. OBOR offers help to developing country, including Indonesia, to develop their infrastructure and domestic industries. This initiative can enlarge China's political power on the global scene, and pose a greater threat to the United States. To collect data and arguments about China's political and economic position, this study uses an explanative-qualitative method. Neorealism, hegemony stability, regionalism, and political economy are theories that are used to shape the thinking frameworks and to solve the existing problems. China also aims for greater power in the region, to secure the country's interest. According to neorealism theory, a country's behavior is a manifestation of the country's interests and the only way to secure the country is by becoming a strong state. The stronger the state, the less chance that the country can be attacked. That means, China's OBOR could also create conflict of interests with other countries.

Keywords: Political economy, foreign policy, struggle of power, power projection, hegemony.

Pendahuluan

Kebijakan dan strategi negara-negara besar atau *big powers* seperti Amerika Serikat dan Tiongkok, sangat mempengaruhi situasi politik dan ekonomi dunia, termasuk Indonesia (Mearsheimer, 2001, p. xi). Oleh karena itu setiap negara perlu mempelajari dan menyusun strategi agar dapat meminimalisir skenario buruk akibat kebijakan negara-negara besar. Saat ini Amerika Serikat (AS) masih memegang peran kepemimpinan global yang sebelumnya ada di bawah kepemimpinan Inggris (Steans, Pettiford, Diez, dan El-Anis, 2001, p. 56). Dalam kepemimpinan AS, tatanan politik dunia menjadi lebih stabil karena adanya kerja sama ekonomi dan keamanan melalui berbagai organisasi internasional seperti *United Nations*, *World Bank*, *International Monetary Fund*, dan *World Trade Organization*.

Namun kebangkitan ekonomi Tiongkok membuat posisi Amerika Serikat goyah. Mearsheimer dalam bukunya "*The Tragedy of Great Power Politics*" mengatakan bahwa kebangkitan Tiongkok menjadi skenario paling berbahaya yang dihadapi AS pada abad ke-21 (Mearsheimer, 2001, p. 402).

Kebangkitan industrialisasi Tiongkok dimulai semenjak reformasi ekonomi dari sosialis menjadi kapitalis, yang dilakukan Deng Xiaoping selaku presiden Tiongkok tahun 1979 (Guthrie, 2006). Sejak saat itu angka investasi asing yang makin meningkat membuat pertumbuhan ekonomi sang *Middle Kingdom* meroket dari yang dahulu memiliki rata-rata satu persen menjadi diatas sepuluh persen tiap tahunnya sampai pada tahun 2010 (Cheung, 2017).

Alhasil, sekarang ini Tiongkok berhasil mengubah statusnya dari negara hampir miskin menjadi negara dengan ekonomi terbesar kedua di dunia setelah Amerika Serikat (World Bank, 2015).⁶

Isu kebangkitan Tiongkok semakin penting untuk dipelajari setelah Xi Jinping – selaku presiden Tiongkok, mengajukan diri

melakukan tata kelola ekonomi global melalui inisiatif *One Belt One Road* (OBOR) dalam pidatonya di *World Economic Forum in Davos*, bulan Januari 2017 silam. OBOR bisa menjadi *grand strategy* Tiongkok untuk memperluas pengaruh politik di kawasan regional Asia, Afrika, bahkan Eropa.

Dalam penelitian ini, penulis tertarik menganalisis kepentingan politik di balik inisiatif *One Belt One Road* Tiongkok. Inisiatif ini menggiurkan, karena menawarkan investasi dan kerja sama ekonomi dalam jumlah yang signifikan di banyak negara, termasuk Indonesia. Namun Indonesia perlu skeptis dan berhati-hati supaya kepentingan politik Indonesia tetap menjadi prioritas dalam kerja sama tersebut.

Kerangka teori

Penulis menggunakan teori neorealisme untuk menjelaskan perilaku Tiongkok dalam Inisiatif OBOR Tiongkok. Neorealisme merupakan cara pandang dalam studi Hubungan Internasional yang berakar dari teori **realisme** yang memiliki pandangan secara umum bahwa **Sistem internasional bersifat anarki**. Anarki terjadi karena tidak ada kedaulatan tertinggi diatas negara sehingga tidak ada satu institusi maupun negara manapun yang dapat menegakkan supremasi hukum dan memastikan negara yang melanggar mendapat hukuman. Oleh karena itu perang menjadi hal yang tidak terhindarkan karena konflik antar negara pasti akan terjadi dan tidak ada negara yang rela menyerahkan kedaulatannya kepada pihak lainnya.

Sistem internasional yang anarki membuat negara-negara tidak dapat bergantung pada negara lainnya sehingga negara dituntut untuk mampu untuk mengandalkan diri sendiri (*self-help*). Realis percaya bahwa kekuatan utama yang membentuk politik dunia adalah negara-negara yang berupaya memperoleh kekuatan dan kemandirian nasional negaranya. Hal ini

terjadi karena realis percaya bahwa **kewajiban utama negara adalah menjamin kelangsungan hidup negaranya (*survival of state*)**, dan bukan kepada komunitas internasional. Oleh karena itu masing-masing **negara selalu bersaing satu sama lain untuk menjamin kekuatan dan keamanan negaranya sendiri.**

Realis melihat bahwa sepanjang sejarah politik internasional **organisasi internasional tidak mampu menciptakan hukum dan perjanjian yang membawa perdamaian dunia** karena masing-masing negara mengutamakan kepentingan nasionalnya. Realis tidak memungkiri bahwa hukum dan moralitas juga memainkan peran dalam politik dunia, namun kepatuhan terhadap hukum tersebut juga dilatarbelakangi oleh **ancaman kekuatan negara yang lebih besar.**

Neorealisme atau realis strukturalis merupakan wajah baru dari realisme yang memanfaatkan sistem internasional untuk mencapai kekuatan yang lebih besar. Bagi neorealis, sifat dasar manusia (*human nature*) memegang sedikit peranan yang menjelaskan mengapa negara bertarung memperebutkan kekuasaan. Sebaliknya, struktur atau arsitektur dari sistem internasional memaksa negara untuk mendapatkan kekuatan yang lebih besar (Dunne, Kurki, and Smith, 2007, p. 84).

Dalam sistem internasional yang anarki tidak ada jaminan bahwa suatu negara tidak akan menyerang negara lainnya, oleh karena itu negara berusaha untuk mendapatkan kekuatan sebesar-besarnya untuk dapat melindungi dirinya sendiri bahkan bila terjadi serangan. Kekuatan besar terjebak dalam belenggu bahwa mereka tidak dapat memiliki pilihan lain selain bersaing satu sama lain untuk mendapat kekuatan jika mereka ingin bertahan.

Teori Stabilitas Hegemoni

Teori Stabilitas Hegomoni

menegaskan bahwa sistem ekonomi internasional yang terbuka dan stabil dapat dibentuk ketika negara dominan atau hegemon bersedia dan mampu menjadi pemimpin, dan ketika negara besar lainnya melihat kebijakan dari negara hegemon relatif menguntungkan (Cohn, 2012, p. 62). Untuk menjadi negara hegemon menurut Bapak Edy Prasetyono juga dibutuhkan nilai-nilai, sistem, serta organisasi internasional yang diterima oleh mayoritas negara dunia (Prasetyono, 2017).

Kaum realis mendefinisikan hegemoni sebagai kondisi dimana distribusi kekuatan dalam sistem internasional tidak merata. Satu negara dengan kekuatan yang paling besar dapat melakukan kontrol dan dominasi terhadap negara-negara yang lebih lemah dalam sistem internasional (Gilpin, 1981, p. 29). Definisi hegemoni secara lebih sempit dapat diartikan sebagai hubungan dimana satu negara dapat memaksakan sebagian besar peraturan dan keinginan (setidaknya melalui hak veto) dalam bidang ekonomi, politik, militer, dipomasi, bahkan budaya (Wallerstein, 1984, p. 38).

Ekonomi Politik Internasional

Ekonomi politik internasional adalah sub-disiplin yang menekankan pada interaksi antara **negara**, unit teritorial yang berdaulat, dengan **pasar**, mekanisme koordinasi dimana penjual dan pembeli bertemu dan menukarkan barang dan jasa dengan harga yang ditetapkan melalui hukum *supply and demand*.¹² Negara sering kali diasosiasikan sebagai *political pursuit of power* dan pasar sebagai *economic pursuit of wealth*.

Ekonomi Politik Internasional melahirkan paradigma baru yang juga dipelajari dalam disiplin ilmu Hubungan internasional diantaranya Liberalisme, Marxisme, dan Merkantilisme. Merkantilisme yang juga disebut sebagai Nasionalisme Ekonomi merupakan paradigma yang diwarnai oleh realisme dan banyak digunakan untuk menjelaskan kondisi politik akhir abad

ke-18 dan awal abad ke-19 yang menyertai terjadinya Perang Dunia I dan II. Menurut Cohn, Merkantilisme atau Nasionalisme Ekonomi menyatakan bahwa :

Economic power is the key to greater political and military power and states should seek to maximise their economic power through protection of domestic industries, increased exports and lower imports. (p. 67)

Oleh karena itu negara yang menganut perspektif realis secara ekonomi politik cenderung akan memaksimalkan kekuatan ekonominya dengan memperbesar ekspor dan memperkecil impor. Kebijakan tersebut dikenal dengan istilah “*beggar-thy-neighbour*”.

Arsitektur Ekonomi Dunia

Pandangan neorealis mengatakan bahwa perilaku negara ditentukan oleh sistem internasional yang ada (Dunne, Kurki, and Smith, 2007, p. 84). Distribusi dan perolehan kekuatan dalam sistem internasional menjadi pertimbangan utama kaum neorealis karena dapat menjamin keberlangsungan hidup negaranya (*survival of state*). Walaupun negara-negara (terutama negara besar) bersaing dengan negara rivalnya untuk mendapat kekuatan yang lebih besar dan memperbesar keamanan, namun isu kemandirian tidak selalu menjadi pendorong utama terjadinya persaingan tersebut. Faktor ideologi dan ekonomi terkadang menjadi isu yang terpenting penyebab persaingan yang bisa berujung pada perang.

Pada umumnya negara besar dalam isu ideologi dan ekonomi akan bersaing secara konsisten menurut teori neorealis, dengan memperoleh kekuatan yang lebih besar (Dunne, Kurki, and Smith, 2007, p. 84). Perang tidak akan terjadi bila negara rival tidak melakukan tindakan agresif yang membahayakan negara besar tersebut dalam posisi perimbangan kekuatannya. Kekuatan di abad ke-21 ini telah terbagi dalam sistem

multipolar yang dimotivasi oleh globalisasi ekonomi yang menuntut persaingan sengit diantara kekuatan-kekuatan tersebut. Oleh karena itu arsitektur ekonomi global sekarang ini menjadi penting untuk diketahui karena mempengaruhi perilaku negara-negara, terutama Tiongkok dan AS yang menjadi dua kekuatan terbesar sampai sekarang ini.

Ekonomi Pasca Perang Dunia II

Menurut teori stabilitas hegemoni, negara hegemon yang muncul pasca Perang Dunia II harus mampu menciptakan sistem, mempromosikan nilai-nilai, dan kepemimpinannya diterima oleh mayoritas negara (Cohn, 2012, p. 62). Negara yang tidak mengikuti nilai-nilai dan sistem yang diciptakan oleh hegemon pada akhirnya akan terkucil dan tidak dapat bertahan dalam sistem internasional tersebut.

Amerika Serikat (AS) memiliki nilai-nilai dalam sistem internasional yang dianggap mampu untuk menjaga stabilitas dunia, seperti sistem ekonomi yang transparan dan terbuka (Prasetyono, 2017). AS merealisasikan nilai tersebut dalam sistem internasional yang disebut sebagai *Bretton Woods Institutes* diantaranya *World Bank*, *International Monetary Fund*, dan *GATT (General Agreements on Tariff and Trade)* yang sekarang telah digantikan fungsinya oleh *World Trade Organization (WTO)* (Cohn, 2012, p. 62).

Sistem yang diciptakan AS ini segera mendapatkan tantangan karena nilai-nilai ideologi liberal-kapitalisnya yang bertentangan dengan nilai-nilai ideologi sosialis-komunis. Oleh karena itu pasca Perang Dunia II, terciptalah persaingan ideologi antara penganut sistem liberal-kapitalis yang disebut sebagai Blok Barat (dipimpin oleh AS), dan sistem sosialis-komunis (dipimpin oleh Uni Soviet). Pada tahun 1989 perang antara kedua ideologi tersebut berakhir dengan ditandai oleh runtuhnya tembok Berlin yang memisahkan

Jerman Barat (representasi liberal-kapitalis) dengan Jerman Timur (representasi sosialis-komunis), dan runtuhnya Uni Soviet. Kemenangan ideologi liberalis-kapitalis memperkuat nilai-nilai dan sistem internasional yang telah dibangun oleh AS, begitu pula dengan kepemimpinan AS sendiri sebagai negara hegemon.

Sistem ekonomi yang terbuka sebagaimana dipromosikan AS teruji mampu mempertahankan stabilitas untuk jangka waktu yang lama. Arsitektur ekonomi dunia sampai sekarang ini masih diwarnai oleh organisasi dan institusi yang mempromosikan nilai-nilai liberalisme Amerika Serikat.

Inisiatif One Belt One Road (OBOR) Tiongkok

One Belt One Road (OBOR) adalah inisiatif yang diperkenalkan oleh Presiden Xi Jinping tahun 2013, mengenai penciptaan dan pengembangan konektivitas rute perdagangan demi terbukanya kesempatan-kesempatan baru. Ide pertama mengenai *The Belt* atau *Silk Road Economic Belt* diumumkan pertama kali oleh Presiden Xi Jin Ping dalam kunjungannya ke Kazakhstan bulan September 2013, sedangkan ide mengenai *The Road* atau *21st Century Maritime Silk Road* diinagurasi melalui pidato sang Presiden dalam kunjungannya ke Indonesia bulan Oktober di tahun yang sama untuk mempromosikan kerjasama maritim yang lebih terintegrasi (State Council Information Office, 2017).

Pada dasarnya inisiatif OBOR terinspirasi dari jalur perdagangan sutera pada zaman dinasti Han yang dibangun dari Xi'an (ibukota Tiongkok pada masa lampau), yang melalui kawasan Xinjiang, Asia Tengah, Timur Tengah, Afrika, dan sampai pada wilayah Eropa. Revitalisasi jalur perdagangan sutera Tiongkok pada masa lampau ini menitikberatkan pada "*hard*" *infrastructure projects* seperti pembangunan jalan, jalur kereta, pelabuhan, dan pipa; juga menitikberatkan pada "*soft*" *projects* seperti *e-*

commerce platforms.

Sedangkan dua ide utama yang dikandung dalam inisiatif OBOR adalah sebagai berikut :

One Belt : The Silk Road Economic Belt
Menekankan pada konektivitas jalur darat dengan : (1) membangun jembatan Eurasia – jalur logistik yang dimulai dari pesisir timur Tiongkok sampai ke Rotterdam, Eropa bagian barat; (2) mengembangkan koridor ekonomi yang menghubungkan Tiongkok dengan Mongolia dan Russia, Asia Tengah, dan Asia Tenggara.

One Road : 21st Century Maritime Silk Road

Menekankan pada pengembangan konektivitas jalur laut yang menghubungkan pesisir timur Tiongkok sampai ke Eropa bagian barat melalui Laut Tiongkok Selatan dan Samudra Hindia.

Inisiatif OBOR sekarang ini diorganisir oleh kelompok kecil dibawah pimpinan Wakil Perdana Menteri Zhang Gaoli, dan dalam pelaksanaannya dibantu oleh *National Development and Reform Commission* (NDRC), Kementrian Luar Negeri, dan Kementrian Perdagangan dibawah koordinasi NDRC. OBOR dalam implementasinya menargetkan keterlibatan dari 64 negara yang berada di kawasan Asia, Eropa, Timur Tengah, dan Afrika dan sudah mulai diupayakan sejak tahun 2015.

OBOR dari Perspektif (Neo)Realis

Kenneth Waltz mengatakan bahwa perilaku suatu negara merupakan manifestasi kepentingan negara tersebut, namun tidak serta merta dapat diartikan secara harafiah mengingat kemungkinan kepentingan tersebut bertentangan dengan kepentingan negara lainnya.

Pertama dan terutama karena situasi politik domestik Tiongkok yang tidak demokratis sehingga penyelesaian masalah domestik dilakukan dengan otoriter. Hal ini

disebut sebagai *incomplete political transition*. Bagaimanapun hal ini bertentangan dengan prinsip Immanuel Kant yang mempercayai bahwa negara dengan sistem pemerintahan demokratis akan cenderung membuat kebijakan yang damai. Sebaliknya lebih memungkinkan bila pemerintahan otoriter beroperasi dalam prinsip yang diperkenalkan Thomas Hobbes dimana manusia menjadi serigala bagi sesamanya. Oleh karena itu melihat situasi domestik otoriter yang sampai sekarang masih dianut oleh Tiongkok, rasanya hampir mustahil mempercayai Tiongkok mampu membuat kebijakan yang damai.

Kedua, Tiongkok melalui inisiatif OBOR sedang mencoba untuk membuat sistem internasional yang berpusat pada dirinya. Walaupun Tiongkok berperan aktif dalam organisasi internasional dan rezim perdagangan yang lahir dari inisiatif AS pasca berakhirnya Perang Dunia II (PBB dan *Bretton Woods Institutes*), namun ambisinya untuk membuat sistem internasional tandingan mulai terlihat melalui lahirnya inisiatif OBOR ini. Pertama inisiatif OBOR diperlengkapi dengan institusi finansial AIIB (*Asian Infrastructure and Investment Bank*) yang dikatakan telah menantang keberadaan bank yang dipelopori oleh Jepang, yaitu ADB (*Asian Development Bank*) (The Economist, 2017).

Terakhir, pembuatan sistem perdagangan internasional dan institusi yang menyertai inisiatif OBOR memiliki motivasi yang bertentangan dengan prinsip liberal. Sebaliknya, Tiongkok merasa pentingnya membentuk sistem dan institusi yang bernuansa liberal untuk melayani kepentingan yang lebih utama bagi penganut cara pikir neorealis, yaitu *survival of state*. Bagian ini akan dibahas secara lebih mendalam dalam subab berikutnya mengenai OBOR sebagai instrumen.

Subab ini berakhir pada kesimpulan bahwa Tiongkok bukanlah negara dengan cara pandang liberal walaupun perilakunya dalam

inisiatif OBOR diwarnai oleh prinsip liberal. Hal ini tercermin dari situasi politik domestiknya yang pasti berdampak pada kebijakan luar negeri Tiongkok, selain itu institusi dan inisiatif perdagangan yang diajukan Tiongkok memiliki motivasi yang berasal dari cara pandangnya yang realis.

Kebijakan Luar Negeri Tiongkok : Perkembangan dan Tujuan

Dua dekade terakhir di abad ke-20, kebijakan luar negeri Tiongkok menggunakan prinsip “*do not attract attention*” (*taoguang yanhui*) dan “*friendly neighbourhood relations*” (*mulin youhou*) (Fasslabend, 2015). Prinsip ini merupakan strategi yang digunakan Tiongkok untuk mencegah konflik dengan negara disekitarnya dan menghasilkan stabilitas kawasan, sehingga Tiongkok dapat fokus pada pembangunan nasional domestiknya. Strategi ini masih digunakan Tiongkok pada awal abad ke-21 dengan prinsip “*peaceful rise*” atau “*peaceful development*” (*haiping fazhan*). Dalam fenomena kelahiran kembali Tiongkok sebagai kekuatan dunia, Presiden Xi Jinping memperkenalkan prinsip baru yang disebut sebagai “*Chinese Dream*” (*zhongguo meng*). Prinsip *Chinese Dream* ini juga menawarkan pola hubungan baru antara kekuatan-kekuatan besar dunia.

Chinese Dream Werner Fasslabend dalam jurnalnya mengatakan bahwa inisiatif *One Belt One Road* terlahir dari cita-cita dan visi sang Negara Tirai Bambu yang disatukan dalam “*Chinese Dream*” oleh Presiden Xi Jinping (Fasslabend, 2015). Kuhn dan Robert Lawrence menjelaskan bahwa *Chinese Dream* mencerminkan kebijakan Tiongkok dalam mencapai cita-citanya (Kuhn, Lawrence, 2017). Secara taksonomi cita-cita tersebut dibagi menjadi 5 kategori. Tiga diantaranya adalah:

1. *National Chinese Dream* adalah cita-cita bersama masyarakat Tiongkok untuk mencapai sasaran yang disebut sebagai “**Two**

100s”. *Two 100s* ini pertama bertujuan untuk mencapai sasaran material dengan menjadikan Tiongkok sebagai **negara dengan masyarakat yang makmur tahun 2020**. Kemakmuran yang dimaksud adalah saat semua warga negara Tiongkok baik di pedesaan atau di perkotaan menikmati hidup yang layak, diukur dengan GDP perkapita sebesar 10.000 USD pada tahun 2020. Kedua, sasaran yang lebih jauh dari *Two100s* adalah melakukan **modernisasi untuk menjadi negara maju pada tahun 2050**, pada ulang tahun negara Tiongkok yang ke-100.

2. *Personal Chinese Dream* memiliki dua sub-kategori yaitu material atau manusia secara fisik, dan mental atau manusia secara psikologi. Secara material cita-cita Tiongkok adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup setiap masyarakatnya seperti kebutuhan pangan (*food security*), kebutuhan papan (*housing*), keamanan, tingkat ekspektasi hidup, pendidikan yang berkualitas, perawatan kesehatan yang modern, dan jaminan masa tua.

3. *Global Chinese Dream* memiliki dua tipe sub-kategori, yang pertama bagaimana *Chinese Dream* menjadi pemimpin ekonomi global dan memberikan keuntungan bagi dunia karena populasinya yang besar. Jika standar hidup masyarakat Tiongkok meningkat maka akan lebih banyak barang dan jasa yang dikonsumsi, termasuk meningkatnya barang impor dari masing-masing negara. Selain itu penduduk Tiongkok juga dapat menciptakan sangat banyak lapangan pekerjaan sehingga tercipta dunia yang semakin makmur. Terlebih lagi karena produksi manufaktur Tiongkok yang murah mampu menyediakan produk-produk esensial seperti telepon genggam dengan harga yang terjangkau (hal ini sangat vital bagi dunia yang terus berkembang). Sub-kategori yang kedua menjelaskan bahwa negara tersebut bertekad memajukan standar hidup domestik. Pastinya situasi penuh konflik akan menggagalkan

tujuan tersebut. Oleh karena itu Tiongkok akan mengupayakan kedamaian demi tercapainya kemakmuran domestik.

OBOR merupakan strategi Tiongkok untuk mencapai cita-cita bangsanya yang dijabarkan dalam *Chinese Dream*, maka OBOR juga dianggap dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi Tiongkok untuk mencapai visi tersebut diantaranya :

1. Pertumbuhan ekonomi Tiongkok yang begitu pesat tidak semata-mata menghasilkan buah yang manis, namun juga memiliki resiko yang harus ditanggungnya. Salah satunya berkaitan dengan *overcapacity* dalam bidang produksi, sehingga perusahaan-perusahaan Tiongkok harus segera mencari pasar baru sehingga proses manufaktur tidak stagnan (Chi and Yongnian, 2016). Selain itu pengembangan pasar yang lebih besar dapat membantu pertumbuhan ekonomi Tiongkok yang sudah memasuki fase “New Normal” (Yiwei, 2016, p. 52).
2. Tiongkok juga mengalami permasalahan domestik lainnya yaitu kenaikan tingkat pengangguran. Pengangguran mulai terjadi ketika pembangunan infrastruktur Tiongkok telah berhasil dilakukan menyeluruh. Proyek dalam negeri yang sudah selesai menuntut proyek-proyek lainnya di luar negeri untuk mengatasi permasalahan pengangguran ini (Lalisang, 2017).
3. Menjamin sumber daya produksi yang berkelanjutan di Tiongkok dengan mempermudah akses terhadap sumber daya dari berbagai negara lainnya (Chi and Yongnian, 2016). Contohnya mempermudah akses minyak dari wilayah Iran ke Tiongkok melalui pembangunan infrastruktur dalam inisiatif OBOR (Champion, 2017).

Berawal dari permasalahan internal yang dihadapi Tiongkok, seperti munculnya gerakan separatis, *overcapacity* barang produksi, kenaikan tingkat pengangguran dan

ketersediaan sumber daya energi, maka OBOR dilihat sebagai jalan keluar untuk menyelesaikan masalah yang ada.

Motif Inisiatif OBOR Tiongkok

Dengan mengetahui situasi domestik negara, serta kebijakan luar negerinya, kita dapat merasionalisasi tujuan dan motif dan perilaku dari negara tersebut. Berdasarkan prinsip luar negeri yang dipromosikan Tiongkok (Fasslabend, 2015), penulis melihat Inisiatif *One Belt One Road* (OBOR) merupakan narasi politik yang digunakan Tiongkok untuk dua proyek besar yaitu :

1. *Silk Road Economic Belt* : untuk mendominasi ekonomi di sepanjang jalur Eurasia.

2. *Maritime Silk Road* : untuk mencapai supremasi maritim di Samudra Hindia.

Jalur Eurasia menjadi penting terutama dalam bagian dari *Economic Belt* OBOR karena kekayaan alam yang terdapat di Asia Tengah dan Timur Tengah sehingga keberlangsungan sumber daya produksi dapat diamankan dan diakses dengan mudah. Kekayaan alam juga terdapat disepanjang jalur *Maritime Silk Road* OBOR yaitu wilayah ASEAN, Afrika, dan Timur Tengah. Wilayah yang dilalui oleh *Economic Belt* maupun *Maritime Silk Road* juga memiliki populasi yang sangat besar dan berpotensi menjadi kekuatan pasar untuk mengurangi permasalahan *overcapacity* domestik Tiongkok.

Kekayaan alam dan kekuatan pasar yang besar dari negara-negara sekitar Tiongkok mampu meningkatkan ekonomi negara tersebut di tengah memasuki fase “New Normal”. Implikasi lebih jauh dari peningkatan ekonomi itu adalah peningkatan kemakmuran warga negaranya, terutama di wilayah Xinjiang dan Tibet sehingga kasus separatistis dapat diredam dengan adanya kemakmuran. Oleh karena itu penduduk

Tiongkok juga tidak akan mempertanyakan ataupun meragukan pemerintahan Partai Komunis Tiongkok yang telah berlangsung selama lebih dari setengah abad.

Kedua proyek besar *Economic Belt* dan *Maritime Silk Road* menuju pada satu tujuan terbesar Tiongkok untuk menjadi kekuatan terbesar di dunia yang merupakan bagian dari *Global Chinese Dream*. Namun dominasi yang merupakan *power projection* demi mendapatkan kekuatan yang lebih besar lagi sehingga dapat memastikan *survival of state* negara Tirai Bambu tersebut dibalut dengan prinsip-prinsip yang telah ditekankan dalam kebijakan luar negerinya. Upaya dominasi tersebut menggunakan prinsip liberal sehingga tidak terlihat menakutkan bagi negara-negara lainnya.

Inisiatif OBOR sebagai Instrumen Tiongkok

Sistem politik internasional mempengaruhi sistem ekonomi internasional dalam waktu yang bersamaan, begitu pula sebaliknya. Perilaku pemerintah suatu negara dalam bidang ekonomi banyak dipengaruhi oleh kalkulasi politik domestik yang nantinya akan menentukan struktur dari politik internasional (Bergsten, Keohane, Nye, 1975, p. 5). Isu ekonomi sekarang ini menjadi lebih penting keberadaannya dibanding waktu yang pernah ada setelah berakhirnya Perang Dunia II. Pasca Perang Dunia II terjadi peningkatan hak-hak individu terutama dalam bidang perdagangan sehingga mendorong globalisasi ekonomi, dan menurunnya perhatian tentang *survival* dan bentuk tradisional dari keamanan.

Bagaimanapun juga setiap instrumen ekonomi sesungguhnya memiliki fungsi untuk melayani kepentingan yang lebih tinggi yaitu: untuk memperluas pengaruhnya pada pola ketergantungan ekonomi yang timbul, demi mempengaruhi transaksi ekonomi uang terjadi sehingga dapat memberikan keuntungan yang lebih banyak bagi suatu negara. Keuntungan ekonomi (*economics benefits*) dalam konteks

ini sama pentingnya dengan pengaruh politik (*political influence*) atau statusnya dalam konteks hubungan ekonomi yang relatif intens.

Bila keuntungan ekonomi berjalan seiring dengan pengaruh politik, maka Tiongkok sedang mengupayakan keuntungan ekonomi yang sebesar-besarnya untuk mendapatkan pengaruh politik yang besar pula. Salah satu implementasinya telah dijabarkan dalam inisiatif OBOR yang penulis percayai sebagai cerminan ambisi Tiongkok untuk menjadi negara hegemon melalui kerjasama ekonomi yang nampaknya tidak dipolitisasi agar tidak menimbulkan kontroversi dan sesuai dengan prinsip kebijakan luar negerinya.

Kesimpulan

Berdasarkan data dan pembahasan yang telah diolah penulis mengenai Ekonomi Politik Inisiatif OBOR Tiongkok, maka dapat disimpulkan bahwa perilaku suatu negara dalam politik internasional dipengaruhi oleh politik domestiknya yang mengutamakan *survival of the state*. Dalam kasus Tiongkok, PKT (Partai Komunis Tiongkok) bertanggung jawab untuk memastikan keberlangsungan hidup negaranya dan memastikan arah tujuan Tiongkok di tahun-tahun kedepan untuk menjadi negara maju. Cita-cita Tiongkok dijabarkan melalui *Chinese Dream*. Untuk dapat mencapai cita-cita tersebut, banyak hal yang harus dilakukan Tiongkok terutama dalam membenahi permasalahan domestiknya seperti kasus separatis, *overcapacity* produksi, pengangguran, dan cadangan sumber daya minyak dan gas. Berdasarkan cita-cita Tiongkok dalam *Chinese Dream*, dan untuk mengatasi permasalahan domestik yang sedang terjadi, maka diajukanlah strategi besar Tiongkok melalui inisiatif *One Belt One Road*. Inisiatif tersebut juga menggambarkan ambisi Tiongkok dalam memenuhi cita-cita dalam *Global Chinese Dream* yang penulis percayai hanya dapat dicapai ketika Tiongkok menjadi kekuatan hegemon regional sehingga ia dapat

memastikan kelangsungan hidup negaranya (*survival of states*). Di kancah internasional, Tiongkok menggunakan instrumen ekonomi dan mengikuti prinsip dan tren yang telah dibangun AS pasca Perang Dunia II. Kerja sama ekonomi yang digunakan Tiongkok hanyalah instrumen yang digunakan untuk dominasi politik dan keamanan baik secara domestik masing-masing negara tujuan, maupun secara internasional.

Inisiatif OBOR Tiongkok merupakan instrumen yang digunakan untuk mencapai hegemoni regional khususnya dalam konteks menyaingi kekuatan negara besar lainnya seperti AS dan India. Selain digunakan sebagai *balancing strategy* melalui inisiatif OBOR Tiongkok juga mencoba beraliansi dengan negara sumber ancaman (*bandwagoning*) seperti negara besar lainnya yaitu dengan Rusia dan Eropa. Wilayah Eurasia dikatakan sebagai “pulau dunia”, bila terjadi integrasi konektivitas perdagangannya di dalamnya maka wilayah diluar kawasan tersebut menjadi terisolasi. Sasaran terbesar Tiongkok adalah mengisolasi AS melalui strategi geopolitik regional dan menjadi hegemon kawasan.

Daftar Pustaka

- Bretton Woods Project. (2017). *What are the Bretton Woods Institutions?* Retrieved from <http://www.brettonwoodsproject.org/2005/08/art-320747>
- Cohn, T. H. (2012). *Global political economy* (6th ed). Boston, MA: Pearson.
- Department of State. (1948). *Marshal Plan, 1948*. Office of the Historian. Retrieved from <https://history.state.gov/milestones/1945-1952/marshall-plan>.
- Dunne, T., Kurki, M., & Smith, S. (2016). *International relations theories: Discipline and diversity*. Oxford, UK: Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/hepl/9780198707561.001.0001>
- Esterberg, K. G. (2001). *Qualitative methods in social research*. New York, NY: McGraw-Hill Companies.
- Fasslabend, W. (2015). The silk road: A political marketing concept for world dominance. *European View*, 14(2), 293–302. <https://doi.org/10.1007/s12290-015-0381-3>
- Gilpin, R. (1981). *War and change in world politics*. New York, NY: Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511664267>
- Gubrium, J.F. & Holstein, J. A. (1997). *The new language of qualitative method*. New York, NY: Oxford University Press.
- Guluzian, C. (2013). Making inroads: China's new silk road initiative. *Cato Journal*, 37(1), 135 - 148.
- Guthrie, D. (2006). *China and globalization: The social, economic, and political transformation of Chinese society*. New York, NY: Routledge.
- Hay, C. (2013). *International relations theory and globalization* (2nd ed). Oxford, UK: Oxford University Press. Retrieved from http://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/zxxx_662805/t1346238.shtml
- Krasner, S. D. (1976). State power and structure of international trade. *World Politics*, 28(3), 317-347. <https://doi.org/10.2307/2009974>
- Kuhn, R. L. (2017). *Structuring the Chinese dream*. Retrieved from http://usa.chinadaily.com.cn/opinion/2014-01/25/content_17257856_2.htm.
- Li, G. (2016). *Interpreting China's diplomatic principles*. Beijing, China: Foreign Language Press.
- Malo, M. & Sulistiawan. (1986). *Metode penelitian sosial, teknik pengumpulan data, Buku Materi Pokok 6*. Universitas Terbuka.
- Mansbach, R. W. & Rafferty, K. L. (2008). *Introduction to global politics*. New York, NY: Routledge. <https://doi.org/10.4324/9780203946114>
- Mearsheimer, J. (2001). *Tragedy of great power politics*. New York, NY: W.W. Norton & Company, Inc.
- Ministry of Foreign Affairs of the People's Republic of China (2018). *Foreign Minister Wang Yi Meets the Press*. Retrieved from https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/zxxx_662805/t1540928.shtml
- Morgenthau, H. (1963). *Politics among nations: The struggle for power and peace* (7th ed). New York, NY: McGraw-Hill/Irwin.
- Nye, J., Keohane, R. O., & Bergsten, C. F. (1975). *International economics and international politics: A framework for analysis*. Washington, DC: The Brookings Institution.
- Peng, Y. (2017, January 20). *How Can China Guide Economic Globalization?* Retrieved from <https://thediplomat.com/2017/01/how-can-china-guide-economic-globalization/>

- Romano, G. C. & Meglio, J. (2016). *China's energy security: A multidimensional perspective, China's new energy haven: Opportunities and challenges in Central Asia*. New York, NY: Routledge.
- State Council Information Office. (2017). *Why is the 'Belt And Road' initiative important?*.
- Stears, J. (2015). *An introduction to international relations theory: Perspectives and themes*. London, UK: Routledge.
- Sugiono, M. (1999). *Kritik Antonio Gramsci terhadap pembangunan dunia ketiga*, Yogyakarta, Indonesia: Pustaka Pelajar.
- Swaminathan, J.M. (2009). *Indian economic superpower: Fiction or future*. Singapore: World Scientific Publishing Co. Pte. Ltd. <https://doi.org/10.1142/6860>
- The Economist. (2017). *The Asian Development Bank tries to evolve*. Retrieved from <https://www.economist.com/news/finance-and-economics/21711922-fifty-years-old-and-under-pressure-china-asian-development-bank-tries>.
- Viotti, P. R., & Kauppi, M. V. (2013). *International relations and world politics* (5th ed.). Upper Saddle River, NJ: Pearson.
- Wallerstein, I. M. (1991). *The politics of the world-economy: the states, the movements, and the civilizations*. Cambridge, UK: Cambridge University Press.
- Waltz, K. (1979). *Theory of international politics*. New York, NY: McGraw-Hill.
- Wang, Y., & Chen, F. (2016). *Belt and road initiative: What will China offer the world in its rise*. Beijing, China: New World Press.
- Yongnian, Z., & Chi, Z. (2018). The Belt and Road Initiative and China's grand diplomacy. *China and the World*, 1(3), 1850015. <https://doi.org/10.1142/S2591729318500153>